

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Perubahan Sosial

Perubahan sosial, menurut Hepper merupakan pergantian yang signifikan mengenai struktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Ia menambahkan ada beberapa tipe perubahan struktur sosial. *Pertama*, perubahan dalam personal yang berhubungan dengan perubahan peranan dan status. *Kedua*, perubahan cara bagian-bagian struktur berhubungan. *Ketiga*, perubahan dalam fungsi dari struktur sosial. *Keempat*, perubahan dalam hubungan lembaga yang berbeda. *Kelima*, kemunculan struktur baru dengan peran dan status yang juga baru.¹

Hawlay mendefinisikan perubahan sosial sebagai setiap perubahan yang tidak akan terulang dari sistim sosial sebagai satu kesatuan.²

Indikator perubahan sosial menurut Piort Stompka yang dituliskannya dalam buku *Sosiologi Perubahan Sosial*, dapat dinilai dari beberapa aspek, yaitu;³

1. Perubahan komposisi masyarakat.
2. Perubahan stuktur masyarakat.
3. Perubahan fungsi masyarakat.
4. Perubahan batas masyarakat.
5. Perubahan lingkungan.

¹ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial (Perspektif Klasik, Posmodern dan Poskolonial)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 5

² Piort Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta; Prenada, 2010), h. 3

³ *Ibid.*, h. 4

Sesuatu bisa disebut mengalami perubahan sosial, jika salah satu dari kelima indikator ini terjadi. Dengan kata lain, meski hanya terpenuhi satu dari kelima indikator ini, menandakan sudah terjadi perubahan sosial dalam sebuah kelompok sosial. Perubahan tidak mesti terjadi pada kelima indikator ini.

B. Resistensi

Merujuk pada definisi yang dikeluarkan Kreitner dan Kinici resistensi merupakan reaksi emosional atau tingkah laku yang muncul sebagai respon munculnya ancaman. Ancaman bisa saja muncul dalam bentuk nyata atau imajiner bila terjadi perubahan. Menurut Greenberg dan Baron resistensi merupakan kecenderungan untuk menolak sepakat pada perubahan.⁴

C. Konflik

Untuk mengurai konsep “konflik umat beragama” penulis berangkat dari teori konflik yang digagas oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Mereka menyatakan bahwa konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan. Kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan, perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang dan membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya.⁵

Kepentingan bisa saja menjadi sangat liar dan tidak terkendalikan namun secara umum ada dua jenis kepentingan. Kepentingan pertama adalah kepentingan

⁴ Rini Nurahaju, *Pengaruh Resistensi Perubahan dan Kecerdasan Emosi Dosen Terhadap Sikap Dosen Mengenai Perubahan ITS dari PTS Menuju PTHBNM*, (Surabaya: Tesis, 2004), h. 37

⁵ Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin, *Teori Konflik Sosial*, terj. Helly P. Soeipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 10

material dan yang kedua adalah kepentingan ideal. Kepentingan material meliputi hal-hal yang konkret, seperti sumber ekonomi dan wilayah, selanjutnya, kepentingan ideal merupakan kepentingan yang berkaitan dengan makna yang bersifat abstrak seperti Agama, tata nilai, ideologi dan visi.⁶

Selain Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin banyak sekali ahli sosiologi yang membicarakan konflik, diantaranya Ruth A. Wallace dan Alison Wolf, mereka menyatakan ada beberapa asumsi mengenai konflik yaitu:⁷

1. Manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berupaya untuk memenuhi kepentingan tersebut.
2. Asumsi kedua menunjukkan *power*. *Power* merupakan hal langka yang terbagi secara tidak merata. *Power* juga memiliki kuasa untuk memaksa. Asumsi ini sangat penting dalam asumsi teori konflik. *Power* dipandang sebagai inti dari relasi sosial. Tidak meratanya distribusi *power* menjadikannya sebagai sesuatu yang diperebutkan dan menjadi kepentingan bagi berbagai pihak.
3. Asumsi ketiga adalah ideologi dan nilai-nilai yang dipandang luhur. Perasaan memiliki kebenaran sering mendorong individu atau kelompok untuk berupaya mendominasi kelompok yang lebih besar.

Max Weber melihat konflik merupakan perebutan dominasi antara “otoritas” dan “kekuasaan”. Otoritas merupakan kuasa yang didapatkan melalui

⁶ I. W. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta sosial, Defenisi Sosial dan Prilaku Sosial)*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet ke-II, h. 69

⁷ *Ibid.*, h. 61

legitimasi, sedangkan “kekuasaan” merupakan dominasi yang diperoleh lewat kekuatan. Lebih lanjut Max Weber menyatakan bahwa tindakan manusia didorong oleh kepentingan-kepentingan.⁸

Kepentingan dalam pandangan Weber terbagi menjadi dua. *Pertama*, kepentingan yang bersifat material. Konflik memperebutkan sumber ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial. Selain kebutuhan ekonomi kebutuhan terhadap kekuasaan dan dominasi merupakan kebutuhan yang fundamental. Weber juga menambahkan untuk memperoleh kekuasaan tidak terbatas pada organisasi politik formal tetapi juga terjadi pada kelompok agama dan pendidikan. *Kedua*, kepentingan ideal, seperti gagasan dan cita-cita. Max Weber menyatakan bahwa perebutan dominasi bukan hanya di wilayah ekonomi dan politik tapi juga mencakup masalah perebutan dominasi dalam hal ideologi yang bersumber dari doktrin keagamaan dan budaya. Lebih dari itu pandangan ideal bukan hanya dipertentangkan bahkan juga dijadikan senjata atau alat dalam pertentangan tersebut. Hal ini menjadikan konflik sangat kompleks, bisa saja pihak yang berkonflik menyatakan pertarungan memperebutkan sumber ekonomi, bukan karena kebutuhan akan sumber ekonomi tersebut, namun dikarenakan untuk mendukung dan memastikan prinsip-prinsip ideal yang mereka anut bisa dijalankan.⁹

⁸ *Ibid.*, h. 70

⁹ *Ibid.*, h. 71

Selanjutnya Max Weber menyatakan ada beberapa asumsi yang menjadi latar belakang konflik yaitu:¹⁰

1. Hubungan sosial memperlihatkan adanya ciri-ciri suatu sistem dan di dalam hubungan tersebut ada benih-benih konflik kepentingan.
2. Fakta sosial merupakan suatu sistem yang berpotensi menimbulkan konflik.
3. Konflik merupakan gejala yang potensial pada setiap sistem sosial.
4. Konflik cenderung bersifat bipolar.
5. Konflik berpotensi lebih besar terjadi pada sistem sosial yang gagal mendistribusikan kekuasaan secara baik.
6. Konflik merupakan sumber potensial agar terjadinya perubahan sosial.

Ada beberapa proporsi mengenai konflik yang dikemukakan oleh Weber yaitu:¹¹

1. Konflik kelas atas dan kelas bawah akan semakin potensial jika pimpinan politis tidak memiliki legitimasi yang tinggi.
2. Semakin kharismanya pemimpin kelas bawah akan mempermudah mereka untuk memobilisasi kekuatan dalam suatu sistem, maka semakin besar tekanan yang akan diterima oleh pemimpin kelas atas.

Lewis Coser, menyatakan konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber-

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, h. 72

sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi. Pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, tapi juga bermaksud untuk menghabisi musuh-musuh potensialnya. Konflik dapat terjadi antara individu, kelompok atau antara individu berhadapan dengan kelompok, juga kelompok dan kelompok. Coser juga menyatakan bahwa konflik merupakan proses interaksi sosial yang penting dan tidak selamanya bersifat merusak. Konflik bisa saja menyumbangkan banyak hal positif kepada pelestarian nilai-nilai kelompok dan mempererat hubungan internal kelompok. Ketika kelompok menghadapi musuh bersama maka integritas didalam kelompok meningkat menghasilkan solidaritas, keterlibatan dan membuat orang mengabaikan konflik internal.¹²

Lewis Coser, menyatakan ada beberapa fungsi konflik yang menjadikan tidak selamanya konflik bernilai buruk dan merusak. Fungsi konflik itu adalah:¹³

1. Kekuatan solidaritas internal dan integritas dalam kelompok akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar.
2. Integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat membantu memperkuat batas antara kelompok itu dan kelompok-kelompok lainnya, khususnya kelompok yang bermusuhan atau potensial bermusuhan.

¹² *Ibid.*, h. 82

¹³ *Ibid.*

3. Di dalam suatu kelompok akan mungkin terjadi perpecahan atau pengotakan dan semakin tingginya penekanan pada konsensus dan konfirmasitas.
4. Para penyimpang dalam kelompok akan dikeluarkan atau tetap dalam kelompok dalam pengawasan yang ketat.
5. Apabila sebuah kelompok tidak mengalami konflik dengan pihak luar, maka tekanan terhadap kebutuhan akan kekompakan dan komitmen kepada kelompok akan berkurang. Para penyeleweng akan sangat mungkin mendapat toleransi dan berpeluang untuk mengejar kepentingan pribadinya dan mengabaikan kepentingan kelompok.

Rafl Dahrendorf berpendapat bahwa konflik terjadi karena faktor perebutan wewenang dan kekuasaan. Menurutnya ada dua macam kelompok yang terlibat dalam konflik yaitu kelompok laten dan kelompok manifest. Kelompok laten merupakan kelompok yang terlibat secara tidak langsung, mendapatkan efek dan memberikan pengaruh. Kelompok manifest merupakan kelompok yang terlibat langsung dalam konflik tersebut.¹⁴

Rafl Dahrendorf menambahkan bahwa konflik merupakan satu dari dua wajah masyarakat. Wajah pertama adalah konsensus dan yang kedua adalah

¹⁴ Muhammad Zuldin, *Konflik Agama dan Resolusinya pada Masyarakat Pedesaan*, Jurnal Miqot, Vol. XXXVII No.2 (Juli—Desember 2013), h. 441

konflik. Ia menambahkan konflik mempunyai fungsi untuk memberikan kontribusi integrasi sistem sosial dan menghasilkan perubahan sosial.¹⁵

Rafl Dahrendorf, selanjutnya memberikan beberapa proposisi mengenai model masyarakat dalam sudut pandang teori konflik yaitu:¹⁶

1. Masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan; perubahan sosial terjadi dimana-mana.
2. Masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik; konflik ada dimana-mana.
3. Setiap anggota masyarakat menyumbang pada proses dis-integrasi dan perubahan.
4. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan oleh beberapa anggota kepada anggota lainnya. Hal ini terjadi karena sumber ekonomi, sumber kekuasaan, sumber kehormatan serta sumber dominansi bersifat terbatas bahkan merupakan hal yang langka. Kelangkaan mendorong penguasa untuk melakukan paksaan agar dominasinya tetap bertahan. Ini merupakan sumber pecahnya integritas masyarakat.

Rafl Dahrendorf, selanjutnya memberikan beberapa proposisi yang menjelaskan bagaimana konflik terbuka bisa benar-benar terjadi:¹⁷

¹⁵ Juarsih, *Konflik Sosial keagamaan Ahmadiyah Qodian dan Nahdatul Ulama*, Skripsi, (Jogjakarta:2003), h. 13

¹⁶ I. W. Wirawan, *Teori-Teori....*, h. 74

¹⁷ *Ibid.*, h. 75

1. Kondisi teknis, berupa munculnya pemimpin kelompok dan tindakan kolektif.
2. Kondisi politik, yaitu berupa kebebasan yang ada untuk membentuk kelompok dan tindakan.
3. Kondisi sosial, meliputi tingkat komunikasi antar-anggota kelompok semu.

D. Konflik Umat Beragama

Dalam kanzanah Studi Agama-agama, *term* yang biasa digunakan untuk membahas tema ini adalah “konflik agama”. Namun menurut penulis istilah ini tidak begitu tepat, dikarenakan agama hanya ada pada dimensi nilai dan konsep. Umat beragamalah yang menerjemahkan lalu menafsirkan agama, kemudian diaktualisasikan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti ritual dan kegiatan dalam dimensi sosial. Dengan begitu subjek konflik adalah “umat beragama” bukanlah “agama”. Selain itu kita semua tentu memaklumi bahwa agama selalu mencita-citakan kebaikan. Karena alasan tersebut penulis menggunakan *term* “konflik umat beragama”.

Konflik umat beragama dilihat dari sudut subjek dan objek konflik, dibagi ke dalam empat tipe.¹⁸

1. Konflik dengan ilmu pengetahuan dan budaya.

¹⁸ Muhammad Zuldin, *Konflik Agama.....*, h. 441

2. Konflik karena pemanfaatan agama untuk mencapai tujuan tertentu. Pada tipe ini agama dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti ekonomi, politik dan dominasi sosial.
3. Konflik diantara para penganut agama yang berbeda.
4. Konflik para penganut agama yang sama.

Jika ditinjau dari alasan terjadi konflik umat beragama bisa dikategorikan dalam tiga jenis.¹⁹

1. Konflik intern agama. Konflik ini bisa terjadi karena pembaharuan atau purifikasi. Para pembaharu melakukan kritik terbuka terhadap pemegang *status quo*.
2. Ketika pemeluk agama merasa ia berada dalam masyarakat yang tidak ideal dan agama menuntut mereka untuk mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang ideal.
3. Konflik umat beragama terjadi ketika umat beragama merasa keberadaannya terancam.

¹⁹ Muhammad Zuldin, *Konflik Agama.....*, h. 442